ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Volume 14, Nomor 2, Tahun 2026, E-ISSN: 2528-0872
doi: 10.32332/adzkiya.v14i1.13194

Kapasitas Fiskal, Ketimpangan Regional, dan Kinerja BUMD: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pendapatan Asli Daerah Indonesia Timur

Fanza Alfaturohman[1*], Anas Malik[2], Sania Nuraziza[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia[1,2,3]
Korespondensi: falfaturohman@gmail.com[*]

Received: 09/03/2026 Revised: 04/06/2026 Accepted: 09/06/2026

Abstract

The low contribution of Regional Original Income (PAD) in Eastern Indonesia Region indicates that regional fiscal capacity in supporting development independence is not yet optimal. This study aims to analyze the influence of Disparity of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Domestic Investment (PMDN), and Profit of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) on PAD in Eastern Indonesia Region in 2023. The novelty of the study lies in the integration of Islamic Economic perspective through the concept of Maqashid Syariah, namely hifz al-mal, al-'adl, amanah, and maslahah as a framework for interpreting the results. The study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance, then analyzed using multiple linear regression with the help of EViews 10. The results show that the Disparity of GRDP has a positive but insignificant effect on PAD (Prob = 0.8281 > 0.05), as well as PMDN which has a positive but insignificant effect (Prob = 0.1654 > 0.05). In contrast, BUMD profit has a positive and significant effect on PAD (Prob = 0.0266 < 0.05). Simultaneously, all variables have a significant effect on PAD. From an Islamic economic perspective, controlling disparities needs to be based on the principle of al-'adl to achieve equitable development. Domestic investment (PMDN) must be managed in a trustworthy manner to maintain the community's economic assets (hifz al-mal), while optimizing BUMD profits is directed towards achieving maslahah through increasing public welfare and benefits in a sustainable manner.

Keywords: *Local Own-Source Revenue (PAD), GRDP Disparity, PMDN, BUMD Profits*

Abstrak

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur menunjukkan belum optimalnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung kemandirian pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur tahun 2023. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi perspektif Ekonomi Islam melalui konsep *Maqashid Syariah*, yaitu *hifz al-mal, al-'adl, amanah*, dan *maslahah* sebagai kerangka interpretasi hasil. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan *EViews* 10. Hasil penelitian menunjukkan

Copyright © 2026,Author/s
This is an open access article under the CC-BY-SA licenses

bahwa Disparitas PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD (Prob = 0,8281 > 0,05), demikian pula PMDN yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (Prob = 0,1654 > 0,05). Sebaliknya, Laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (Prob = 0,0266 < 0,05). Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengendalian disparitas perlu berlandaskan prinsip *al-'adl* untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. PMDN harus dikelola secara *amanah* guna menjaga aset ekonomi masyarakat *(hifz al-mal)*, sedangkan optimalisasi laba BUMD diarahkan pada pencapaian *maslahah* melalui peningkatan kesejahteraan dan kemanfaatan publik secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Disparitas PDRB, PMDN, Laba BUMD

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam suatu perekonomian, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia (Syamsiyah et al., 2022). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu tujuan penting dalam kebijakan pembangunan nasional guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. (Huda et al., 2024). Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata antar daerah (Muhammad et al., 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Wang et al., 2025). Namun, perbedaan potensi ekonomi dan sumber daya antar wilayah menyebabkan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar (Kelen et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Peningkatan PAD dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat (Aisyah et al., 2025). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat mendorong pembangunan infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih belum optimal (Lestari et al., 2025). Menurut Mahi (2000: 6–7), lemahnya PAD disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu basis pajak dan retribusi yang terbatas, ketergantungan daerah pada pusat transfer dana, rendahnya kemampuan teknis pemungutan pajak, serta lemahnya perencanaan dan pengawasan keuangan daerah yang menyebabkan kebocoran penerimaan (Christianingrum & Aida, 2021).

Teori Fiscal Federalism yang dikemukakan oleh Oates (1972) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menggali sumber pendapatan daerah guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (Latifa et al., 2025). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kemandirian fiskal daerah. Menurut teori ini, kapasitas fiskal daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Disparitas PDRB mencerminkan kondisi ekonomi wilayah yang memengaruhi kemampuan daerah menghasilkan pendapatan. PMDN mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak daerah, sedangkan laba BUMD memberikan kontribusi langsung terhadap PAD melalui dividen atau pembagian laba. Dengan demikian, teori Fiscal Federalism menjadi landasan bahwa kondisi ekonomi daerah, investasi domestik, dan kinerja BUMD dapat meningkatkan kapasitas fiskal serta Pendapatan Asli Daerah.

Kawasan Indonesia Timur (KIT) mencakup sebelas provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Gobel Febrianti R et al., 2025). Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 pada 11 provinsi di Kawasan Indonesia Timur, masih terdapat fenomena disparitas yang cukup tinggi dalam kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan PAD antarprovinsi yang relatif besar, di mana Sulawesi Selatan mencatat PAD tertinggi sebesar Rp4.834,73 miliar, sementara Sulawesi Barat hanya sebesar Rp438,35 miliar. Selain itu, beberapa provinsi seperti Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat juga memiliki PAD yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Kawasan Indonesia Timur masih belum merata. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya perbedaan tingkat aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB, perbedaan realisasi PMDN, serta variasi kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba sebagai sumber pendapatan daerah. Akibatnya, potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah belum mampu dikonversi secara optimal menjadi PAD. Kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah strategis dengan adanya kekayaan alam yang dimiliki suatu wilayah sangat beragam dan melimpah, di antaranya potensi laut, hasil pertambangan, cadangan minyak bumi dan gas, serta hutan produksi. Potensi tersebut seharusnya dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, namun pemanfaatannya masih belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Kay, 2022).

Disparitas PDRB antar daerah di Kawasan Indonesia Timur menunjukkan ketimpangan pembangunan yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Daerah dengan PDRB tinggi cenderung memiliki kemandirian fiskal lebih baik, sedangkan daerah dengan PDRB rendah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat karena keterbatasan kapasitas fiskal (Ernah et al., 2025). Selain itu, tingginya PDRB meningkatkan kemampuan belanja daerah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang secara tidak langsung mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM ini mencerminkan potensi perekonomian daerah yang cukup untuk menghasilkan PAD lebih baik (Nursila T Ahmat et al., 2025). Daerah

dengan PDRB rendah umumnya masih bergantung pada sektor primer dan pemanfaatan sektor sumber daya alam yang belum maksimal, sehingga kontribusi PAD mereka relatif kecil dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi yang lebih beragam dan maju (Muhammad Alif Rafsanjani et al., 2025).

PMDN juga menjadi faktor penting yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Kehadiran PMDN berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu mendorong peningkatan produksi di berbagai sektor ekonomi maupun industri (Siwi et al., 2021). PMDN juga memiliki potensi dalam memperkuat basis fiskal daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. Modal dalam negeri yang ditanamkan pada berbagai sektor ekonomi dapat mendorong peningkatan kemampuan produksi dan efisiensi usaha, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Keadaan ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan dan kemampuan beli masyarakat (Trisniani Sherafima & Sugianto, 2025). Dengan demikian, akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.

Selain penanaman modal oleh PMDN, pendapatan yang didapatkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi faktor krusial dalam memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 dan diperkuat dengan UU No. 5 Tahun 1974, yang bertujuan untuk mendukung kemajuan daerah melalui penyediaan layanan publik, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah. BUMD menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor, antara lain perbankan (Bank Pembangunan Daerah, Bank Pasar), penyediaan air bersih (PDAM), serta sektor produktif lainnya seperti industri, perdagangan, perhotelan, pertanian, perkebunan, dan percetakan (Sari et al., 2021). Laba yang dihasilkan BUMD sangat berpengaruh terhadap PAD. Jika keuntungan BUMD meningkat, maka pendapatan daerah juga akan bertambah. Sebaliknya, jika laba BUMD menurun, maka kontribusinya terhadap PAD juga akan berkurang. Artinya, kinerja BUMD menjadi salah satu kunci dalam memperkuat keuangan daerah (Listyowati & Rahmayati, 2023).

Meski demikian, upaya meningkatkan PAD melalui PDRB, PMDN, dan laba BUMD harus tetap berpegang pada prinsip keseimbangan pembangunan. Dalam perspektif Islam, hal ini sesuai QS. Al-Qashash ayat 77, yang menekankan pentingnya mencari keberkahan dunia tanpa mengabaikan tanggung jawab ukhrawi, sehingga kebijakan pembangunan dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan lebih mandiri dalam mendanai pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Kondisi ini tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya menarik investor untuk menambah modal. Peningkatan

investasi tersebut selanjutnya mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkokoh fondasi ekonomi daerah secara menyeluruh (Noviana Sri Hastuti & Dito Aditia Darma Nasution, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh disparitas PDRB, PMDN dan laba BUMD pada PAD. Penelitian dari (Priyono & Handayani, 2021) dan (Meuthia et al., 2023), menunjukkan PDRB terbukti memberikan pengaruh yang bersifat positif serta memiliki tingkat signifikansi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, yang berarti peningkatan aktivitas ekonomi daerah mampu memperluas basis pendapatan dan meningkatkan kapasitas fiskal. Penelitian oleh (Sinaga Defprin & Rozaini Noni, 2023), menemukan bahwa PMDN berpengaruh signifikan terhadap PAD karena investasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun efeknya bisa kurang optimal jika pengelolaan dan struktur ekonomi tidak mendukung. Sementara itu, terkait kinerja BUMD, (Dona et al., 2022) laba BUMD berperan meningkatkan PAD meski kontribusinya masih kecil, sedangkan (Mahasarani et al., 2024). Menemukan bahwa laba BUMD tidak memiliki dampak yang besar terhadap PAD, namun tetap memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah di masa depan.

Penelitian sebelumnya umumnya menganalisis pengaruh PDRB, PMDN, atau laba BUMD secara parsial terhadap PAD, dengan lebih banyak menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi agregat dan fokus pada wilayah tertentu, sehingga ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan kondisi Kawasan Indonesia Timur belum tergambar secara komprehensif. Selain itu, kajian PMDN sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, bukan langsung pada PAD, sedangkan temuan tentang laba BUMD masih bervariasi. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan disparitas PDRB, PMDN, dan laba BUMD dalam satu model analisis, berfokus pada Kawasan Indonesia Timur tahun 2023 karena karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda dengan wilayah Indonesia barat, dimana meskipun sumber dayanya yang melimpah namun kurang dalam kemandirian pendapatan dan masih mengandalkan transfer pusat. Kebaruan teoretis penelitian ini terletak pada integrasi perspektif ekonomi Islam ke dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan ekonomi konvensional, penelitian ini memanfaatkan kerangka Maqashid Syariah sebagai landasan normatif untuk menilai hubungan antara kapasitas fiskal daerah, ketimpangan regional, investasi domestik, dan kinerja BUMD. Dalam kerangka tersebut, konsep *hifz al-mal, al-'adl, amanah,* dan *maslahah* digunakan sebagai instrumen analisis untuk memahami implikasi ekonomi dan sosial dari pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah.

Penelitian ini berupaya melakukan analisis komprehensif untuk mengkaji pengaruh disparitas PDRB, PMDN, dan laba BUMD terhadap PAD di kawasan Indonesia timur perspektif ekonomi islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur. Data yang digunakan merupakan data sekunder *cross-section* tahun 2023 yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Populasi penelitian mencakup seluruh 11 provinsi di Kawasan Indonesia Timur. Populasi yang diteliti mengacu pada semua subjek, objek, atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dari penelitian (Candra Susanto et al., 2024). Penelitian menggunakan teknik *sampling jenuh*, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel adalah segmen dari suatu kelompok yang dipilih untuk merepresentasikan keseluruhan populasi (Purwanza et al., 2022). Pemilihan tahun 2023 didasarkan pada ketersediaan data terbaru yang lengkap dan konsisten pada seluruh wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak *EViews* 10. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif serta uji asumsi klasik yang meliputi uji *normalitas*, *multikolinearitas*, dan *heteroskedastisitas*. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap PAD, uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi PAD. Selain analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai kerangka interpretatif dalam membahas hasil penelitian. Interpretasi dilakukan melalui konsep *maqashid syariah*, *al-'adl* (keadilan), *amanah* (akuntabilitas), dan *maslahah* (kemaslahatan) guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (miliar rupiah), sedangkan variabel independen adalah disparitas PDRB (satuan indeks), PMDN (miliar rupiah) dan laba BUMD (juta rupiah).

Adapun spesifikasi model regresi linier berganda dengan dimensi data *cross section* dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathrm{PAD}i = \beta 0 + \beta 1\mathrm{DPDRB}i + \beta 2\mathrm{PMDN}i + \beta 3\mathrm{LBUMD}i + \varepsilon i$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah
DPDRB : Disparitas Produk Domestik Regional Bruto
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri

LBUMD : Laba Badan Usaha Milik Daerah
β0 : Konstanta
β1, β2, β3 : Koefisien regresi variable bebas
i : Data *cross section* (11 wilayah Indonesia timur)
ε*i* : *Error term*

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tiga variabel independen yang terdiri atas Disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai definisi operasional, indikator pengukuran, satuan dan rumus masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel.1 Variabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan	Rumus
Pendapatan Asli Daerah	Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipahami sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi yang berada di dalam wilayahnya sendiri. Sumber penerimaan ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu hasil pemungutan pajak daerah, penerimaan dari retribusi daerah, pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta berbagai jenis pendapatan sah lainnya yang diakui	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Miliar Rupiah	Realisasi PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

	oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Taroreh et al., 2022)			
Disparitas PDRB	Disparitas PDRB merupakan suatu kondisi ketika distribusi pendapatan di dalam masyarakat berlangsung tidak merata, sehingga terdapat perbedaan tingkat pendapatan yang cukup signifikan antarindividu atau antarkelompok sosial (Fitri et al., 2021).	Indeks Wiliamson	Indeks	$IW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_i (Y_i - \bar{Y})^2}{n}}$ Keterangan: IW :Indeks Williamson, ukuran ketimpangan PDRB antardaerah. Nilai mendekati 0 menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan mendekati 1 menunjukkan ketimpangan tinggi. n :Jumlah wilayah atau provinsi/kabupaten yang dijelaskan. Fi :Proporsi penduduk wilayah ke- i terhadap total penduduk (f_i = penduduk wilayah i ÷ total penduduk). Yi :PDRB per kapita wilayah ke- i (misalnya dalam rupiah per orang). Y :Rata-rata PDRB per kapita dari seluruh wilayah.
Penanaman Modal Dalam Negeri	Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat 2,	Realisasi Investasi PMDN	Miliar Rupiah	$PMDN = \sum_{i=1}^{n} I_i$ Keterangan:

	Penanaman Modal Dalam Negeri adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor asal dalam negeri. Artinya, modal yang digunakan berasal dari sumber domestik untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha di wilayah Indonesia (Salsabila, 2024).			Ii : Nilai investasi PMDN di satu daerah. n : Jumlah daerah.
Laba BUMD	Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber keuangan yang sah bagi daerah, berupa pendapatan asli daerah yang berasal dari keuntungan bersih atau aktivitas komersial perusahaan daerah, yang kemudian disetorkan untuk mendukung anggaran daerah (Juita et al., 2024).	Laba Bersih	Juta Rupiah	Laba Bersih = Pendapatan – (Biaya Operasional + Biaya Non Operasional + Pajak)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis statistik, perlu dipahami kondisi empiris variabel penelitian di Kawasan Indonesia Timur tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perbedaan yang cukup besar antarprovinsi. Sulawesi Selatan memiliki PAD tertinggi sebesar Rp4.834,73 miliar, sedangkan Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat memiliki PAD di bawah Rp800 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan kapasitas fiskal dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Tingkat disparitas PDRB di Kawasan Indonesia Timur juga masih beragam. Papua Barat memiliki nilai disparitas tertinggi sebesar 1,50, diikuti Sulawesi Tengah sebesar 1,46, sedangkan Gorontalo memiliki nilai disparitas terendah sebesar 0,17. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi antarprovinsi belum berlangsung secara merata. Dari

sisi investasi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih terkonsentrasi pada beberapa provinsi tertentu. Sulawesi Selatan mencatat nilai PMDN tertinggi sebesar Rp11.468,30 miliar, diikuti Sulawesi Tenggara sebesar Rp7.734,60 miliar dan Sulawesi Utara sebesar Rp7.698,20 miliar. Sebaliknya, Maluku memiliki nilai PMDN terendah sebesar Rp1.904,00 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi antarprovinsi masih berbeda-beda. Sementara itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menunjukkan variasi yang cukup besar. Sulawesi Selatan memperoleh laba tertinggi sebesar Rp672.001 juta, diikuti Papua sebesar Rp402.432 juta. Sebaliknya, Gorontalo dan Maluku Utara mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp7.145 juta dan Rp8.814 juta. Perbedaan kinerja tersebut menunjukkan bahwa kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum merata antarprovinsi di Kawasan Indonesia Timur.

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa variabel disparitas PDRB (X1) memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.697273 dengan nilai tengah (median) 0.530000. Nilai tertinggi yang tercatat adalah 1.500000 dan nilai terendah 0.170000., sedangkan standar deviasinya sebesar 0.454381. Pada variabel PMDN (X2), diperoleh nilai mean sebesar 4975.882 dan median 3960.100. Nilai tertinggi mencapai 11468.30 dan nilai terendah 1904.500, dengan standar deviasi sebesar 3099.625. Selanjutnya variabel laba BUMD (X3) memiliki rata-rata sebesar 201415.2 dan median 155653.4. Nilai maksimum sebesar 672001.2 serta nilai minimum -8813.980, sementara standar deviasinya sebesar 225904.3. Sedangkan variabel PAD (Y) memiliki mean sebesar 1357.656 dengan median 1332.050. Nilai tertinggi tercatat 4834.730 dan nilai terendah 438.3500, serta standar deviasi sebesar 1238.538.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas, yang juga dikenal sebagai hubungan ganda, yaitu kondisi di mana terdapat keterkaitan linier antara variabel independen (X) dalam model regresi berganda. Keadaan ini bisa dikenali dengan memeriksa nilai Faktor Inflasi Varians (VIF). Menurut kriteria pengujian, jika angka VIF berada lebih kecil dari 10, maka dapat diartikan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya masalah multikolinearitas antara variabel yang tidak tergantung. Sementara itu, apabila nilai VIF sama dengan atau melebihi 10, maka ada indikasi bahwa multikolinearitas terjadi (Paul K P et al., 2022). Dari hasil analisis multikolinearitas, terlihat nilai centered Variance Inflation Factor (VIF) dihitung pada setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian yaitu disparitas PDRB sebesar 1.047506, PMDN sebesar 1.760345, dan laba BUMD sebesar 1.752559 bernilai < 10. Ini menunjukkan semua variabel bebas dalam model tidak memperlihatkan tanda-tanda adanya multikolinearitas.

Uji Normalitas

Normalitas dilakukan guna menilai apakah sisa kesalahan (residual) yang dihasilkan oleh model regresi linier berganda mengikuti pola penyebaran normal. Residu yang terdistribusi secara normal adalah syarat untuk model regresi yang akurat. Sebuah residu dianggap berdistribusi normal jika titik data mengikuti pola garis diagonal atau nilai signifikansi > 0.05 (Feriansyah & Lufi Zulfikar, 2025). Berdasarkan hasil uji normalitas menerapkan pendekatan Jarque-Bera, didapatkan nilai probabilitas 0.9307 > 0.05. Dengan demikian, dapat dinyatakan jika residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Keadaan ini menunjukkan model telah memenuhi salah satu prinsip dasar, yaitu asumsi normalitas, sehingga model regresi tersebut siap digunakan untuk analisis berikutnya.

Uji Heteroskedatisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana varians error term tidak konstan pada seluruh pengamatan dalam model regresi linier berganda. Untuk menguji heteroskedastisitas, digunakan metode umum seperti Breusch-Pagan Test dan White Test guna mengidentifikasi variasi tidak konstan pada residual yang dapat mengganggu efisiensi estimasi parameter. Kriteria keputusan didasarkan pada pvalue: jika p-value < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika ≥ 0,05 berarti homoskedastisitas (Gadafi, 2024). Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, diperoleh nilai F-statistik sebesar 0,0677 > 0,05, serta nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,0790 > 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, model yang digunakan menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan sehingga gejala ketidaksamaan varians tidak ditemukan pada data penelitian.

Uji Statistik

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian statistik diterapkan guna memahami adakah dampak dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat jika dianalisis secara parsial. Berikut hasilnya menunjukkan bahwa:

1. Hasil pengujin t pada variabel Disparitas PDRB (X1) menunjukkan angka statistik t yang diperoleh sebesar 0.225412 yang memiliki nilai lebih rendah daripada t tabel 2.365, hasil signifikansi 0.8281 lebih tinggi dari 0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga Disparitas PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ini menunjukkan secara terpisah, variabel Disparitas PDRB memiliki dampak positif, tetapi tidak signifikan terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur tahun 2023.
2. Analisis t variabel PMDN (X2) menyatakan nilai t yang telah dihitung sebesar 1.548778 < t tabel 2.365, tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0.1654 > 0.05. Akibatnya, H0 dinyatakan dapat diterima sementara H1 tidak dapat diterima. Menyatakan secara terpisah, PMDN mempunyai dampak positif, tetapi tidak signifikan terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2023.

3. Penilaian t pada variabel Laba BUMD (X3) memperlihatkan nilai t yang dihitung sebesar 2.798837 > t tabel 2.365, tingkat signifikansi yang dihasilkan dari pengujian 0.0266 < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hipotesis nol (H0) tidak dapat dipertahankan, sedangkan hipotesis alternatif (H1) dinyatakan dapat diterima. Ini menunjukkan jika variabel laba BUMD berdasarkan individu mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2023.

Uji Simultan (Uji f)

Pengujian f digunakan dalam analisis penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh yang diberikan oleh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat ketika diuji secara bersamaan dalam model. Perhitungan f menghasilkan nilai f hitung 9.233831 > f tabel 4.35, dengan probabilitas 0.007879 < 0.05. Ini menunjukkan bahwa disparitas PDRB, PMDN, dan laba BUMD memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD secara simultan.

Uji Koefisien Determinan (R2)

Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen sebagai akibat dari pengaruh variabel independen yang dianalisis secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda, nilai R-squared yang diperoleh sebesaar 0.798280. Ini berarti bahwa 79,82% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel Disparitas PDRB, PMDN, dan Laba BUMD, sedangkan 20,18% faktor-faktor lainnya yang tidak terlibat dalam penelitian ini turut memengaruhi sisanya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan serta pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel ketergantungan. Variabel bebas, yang berdampak pada variabel terikat, dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi seperti berikut:

$$Yi = \beta 0 + \beta 1 X1i + \beta 2 X2i + \beta 3 X3i + \varepsilon i$$

PAD = -104.909592458 + 106.750818839*DPDRB + 0.139384411294*PMDN + 0.00344845480266*LBUMD + εi

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai konstan -104.909592458 menunjukkan jika tidak ada variabel Disparitas PDRB, PMDN, dan Laba BUMD, maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan bernilai -104. 09592458.
2. Nilai koefisien beta untuk variabel Disparitas PDRB tercatat sebagai 106.750818839. Jika variabel lainnya dianggap tetap dan Disparitas PDRB (X1) naik 1%, maka diperkirakan PAD (Y) bertambah sebesar 106.750818839. Sebaliknya, apabila Disparitas PDRB (X1) menurun 1%, PAD (Y) akan turun dengan jumlah yang sama.

3. Koefisien beta untuk variabel PMDN tercatat pada angka 0.139384411294. Jika variabel lain tidak berubah dan PMDN (X2) naik 1%, PAD (Y) akan bertambah sebesar 0.139384411294. Di sisi lain, jika variabel lain tetap dan PMDN (X2) turun 1%, maka PAD (Y) juga akan berkurang dengan jumlah yang sama.
4. Koefisien beta untuk variabel Laba BUMD tercatat sebesar 0.00344845480266. Jika kita menganggap variabel lain tetap dan Laba BUMD (X3) meningkat sebesar 1%, maka kita bisa memperkirakan PAD (Y) akan meningkat sebesar 0.00344845480266. Di sisi lain, jika variabel lain tetap dan Laba BUMD (X3) mengalami penurunan sebesar 1%, maka PAD (Y) juga akan turun dengan jumlah yang sama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan sumber daya ekonomi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibandingkan oleh disparitas PDRB maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Meskipun Disparitas PDRB dan PMDN memiliki arah hubungan positif terhadap PAD, keduanya belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, laba BUMD terbukti menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.

PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antara variabel penelitian dan hasil pengujian hipotesis, berikut disajikan sintesis hasil analisis regresi yang menggambarkan arah dan signifikansi pengaruh Disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur tahun 2023.



Sumber: Hasil persiapan peneliti menggunakan *EViews* 10, 2026.

Berdasarkan gambar tersebut, Disparitas PDRB dan PMDN menunjukkan hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun keduanya tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,8281 dan 0,1654 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sebaliknya, Laba BUMD menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap

PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0,0266 yang lebih kecil dari 0,05. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji F sebesar 0,007879. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BUMD menjadi faktor yang paling berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia Timur dibandingkan dengan Disparitas PDRB dan PMDN secara parsial.

Pengaruh Disparitas PDRB Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, variabel Disparitas PDRB (X1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 106.7508 dengan tingkat probabilitas 0.8281 > 0.05. Hasil statistik ini mengindikasikan bahwa Disparitas PDRB memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Temuan yang tidak signifikan ini sejalan dengan penelitian Munawaroh et al. (2025) yang menunjukkan bahwa variasi fluktuasi PDRB tidak selalu menjadi stimulus utama dalam mendongkrak PAD secara linier di setiap wilayah.

Secara teoritis, Todaro dan Smith (2006) dalam konsep disparitas regional menyatakan bahwa wilayah berpendapatan tinggi memiliki kecenderungan menabung dan akumulasi modal yang lebih besar, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibanding wilayah tertinggal (Devi Astuti & Alexandra Hukom, 2023). Dalam konteks Indonesia Timur, kondisi tersebut tecermin dari indeks ketimpangan antar-11 provinsi yang menunjukkan angka merata (di bawah angka 1), yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antarwilayah sebenarnya relatif seimbang. Hubungan yang berarah positif menandakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi atau aglomerasi di beberapa titik wilayah bermodal kuat berpotensi meningkatkan basis pajak dan kapasitas fiskal lokal, yang pada gilirannya dapat menaikkan PAD di wilayah bersangkutan.

Meskipun berarah positif, dampak tersebut tidak mencapai tingkat signifikansi yang nyata bagi kawasan secara agregat. Berdasarkan tinjauan ekonomi pembangunan dan perspektif ekonomi Islam, disparitas atau ketimpangan yang melebar pada dasarnya mencerminkan adanya hambatan dalam ketidakmerataan fiskal serta indikasi ketidakadilan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya akan mengalami ketertinggalan, sehingga secara akumulatif potensi PAD di Kawasan Indonesia Timur secara keseluruhan tidak mampu terangkat secara signifikan. Ketimpangan ini menghambat redistribusi kekayaan yang adil dan merata, yang merupakan prinsip utama dalam keadilan distribusi ekonomi Islam.

Faktor utama yang menyebabkan ketidaksignifikanan ini adalah struktur ekonomi Kawasan Indonesia Timur yang masih didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan. Kontribusi langsung dari kedua sektor

ekstraktif ini terhadap PAD relatif kecil, karena sebagian besar porsi penerimaan dan bagi hasil dari aktivitas tersebut dikelola langsung oleh pemerintah pusat sebagai pendapatan negara (Imansyah & Sambodo, 2024). Di samping itu, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pengiriman dana transfer dari pemerintah pusat mengakibatkan fluktuasi PDRB maupun tingkat disparitas antarwilayah tidak memberikan pengaruh atau sensitivitas yang kuat terhadap kapasitas Pendapatan Asli Daerah (Fathiyah et al., 2022).

Pengaruh PMDN Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, variabel Investasi PMDN (X2) menunjukkan koefisien sebesar 0.139384 dengan tingkat probabilitas 0.1654 > 0.05. Kondisi ini menunjukkan bahwa Investasi PMDN memiliki dampak positif, tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia Timur. Akibatnya, Hipotesis nol diterima dan hipotesis satu ditolak. Hasilnya sama seperti penelitian (Pauli Sisrawati et al., 2024) berjudul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Sulawesi Pada Tahun 2017-2021".

Dalam teori investasi dan pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow Swan (1956), investasi berperan penting dalam meningkatkan output melalui akumulasi modal fisik yang didukung oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Putri, 2024). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mampu mendorong perekonomian daerah dengan memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan sektor-sektor potensial seperti industri pengolahan, pertanian, dan jasa. Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut diharapkan pada akhirnya dapat mendorong pendapatan asli daerah serta masyarakat (Ahmad et al., 2025). Jadi, PMDN berpengaruh terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena akumulasi modal di Kawasan Indonesia Timur belum dikelola secara optimal, di mana investasi yang masuk belum diiringi oleh efisiensi pengelolaan, kemajuan teknologi, serta struktur ekonomi yang memadai. Selain itu, dominasi sektor primer yang memiliki nilai tambah rendah dan masih minimnya belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi menyebabkan kontribusi masyarakat terhadap pendapatan asli daerah menjadi terbatas dan belum terlihat secara nyata (Basri et al., 2025)·

Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia Timur

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, variabel laba BUMD (X3) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.003448 dengan tingkat probabilitas 0.0266 < 0.05, yang menunjukkan jika laba BUMD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah di Kawasan Indonesia timur. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis nol (H0) dinyatakan diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H1) tidak diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari (Yahya & Wildan Syafitri, 2024) dengan judul

"Analisis Pengaruh Penyertaan Modal dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah".

Dalam teori ekonomi publik Musgrave (2009), Salah satu tugas pokok pemerintah adalah melaksanakan fungsi alokasi, yaitu menawarkan barang dan layanan publik yang tidak dapat disediakan dengan baik menggunakan sistem pasar (Bakara et al., 2024). Dalam hal ini, BUMD menjadi alat pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Keuntungan yang didapatkan BUMD bisa meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak dana. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih efisien, dan pelayanan publik dapat dibiayai dengan lebih baik.

Pengaruh Disparitas PDRB, PMDN, dan Laba BUMD Secara Simultan Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Hasil dari uji f atau uji simultan menunjukkan statistik sebesar 9.233831 dengan probabilitas 0.007879, < 0.05. Dengan demikian hipotesis nol (H0) tidak dapat dipertahankan sedangkan hipotesis alternatif (H1) dinyatakan berlaku. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang diuji menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kawasan Indonesia Timur. Koefisien determinasi (R2) yang bernilai 0.798280 mengungkapkan bahwa 79,82% perubahan pendapatan asli daerah mampu dijelaskan oleh tiga variabel yang dianalisis dalam penelitian tersebut, sedangkan 20,18% sisa dari itu dipengaruhi oleh faktor lain tidak termasuk dalam model penelitian yang digunakan.

Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Disparitas PDRB, PMDN, dan Laba BUMD Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Dalam ekonomi syariah, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB), tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahah atau kebaikan yang membawa falah, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan penting baik di dunia ini maupun di kehidupan setelah mati. Karena hal itu, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dimanfaatkan untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan masyarakat *(hifz al mal),* serta mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan *(hifz al nafs)* dan pendidikan *(hifz al 'aql)*, sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* (Mahri et al., 2021).

Dalam islam memerintahkan prinsip keadilan (*al-adl*) dan melarang keras segala bentuk korupsi, perintah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada QS. Surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٨٨

Artinya "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh atau menguasai barang milik orang lain melalui cara yang tidak dapat diterima. Istilah "memakan" dalam ayat ini tidak dimaknai secara harfiah, melainkan menggambarkan perbuatan mengambil, menguasai, atau merampas harta orang lain tanpa hak dan tanpa izin yang sah. Pesan utama ayat ini adalah pentingnya menjaga dan menghormati kepemilikan orang lain sebagaimana kita menjaga harta milik sendiri. Setiap bentuk kesewenang-wenangan terhadap harta orang lain dipandang sebagai perbuatan yang merugikan tidak hanya individu yang dirugikan, tetapi juga tatanan sosial secara keseluruhan, karena korban ketidakadilan tersebut merupakan bagian dari masyarakat (Umayyatun, 2023).

Dengan menerapkan nilai *al-'adl*, *amanah,* dan *maslahah* dalam tata kelola ekonomi daerah, pengaruh dari variabel disparitas PDRB, PMDN, dan laba BUMD terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur dapat dianalisis secara lebih mendalam guna memperkuat pemerataan dan keadilan ekonomi.

Pertama, dalam konteks Disparitas PDRB, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi antarwilayah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara merata. Meskipun terdapat kecenderungan hubungan positif antara disparitas PDRB dan PAD, pengaruh tersebut tidak signifikan, sehingga ketimpangan ekonomi belum dapat dianggap sebagai faktor utama yang menentukan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Prinsip *al-'adl* menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi makro, melainkan harus berfokus pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengendalian ketimpangan PDRB berfungsi mencegah konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu agar tidak melahirkan ketidakadilan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pembangunan yang lebih inklusif agar dinamika ekonomi yang tumbuh di suatu wilayah dapat memberikan multiplier effect yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan dan kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan (Abidin et al., 2025).

Kedua, dalam konteks PMDN, ekonomi Islam memandang investasi sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat apabila dikelola secara produktif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa arus investasi yang masuk ke daerah belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan penerimaan fiskal daerah secara optimal. Agar investasi tidak sekadar menjadi alat akumulasi kekayaan sekelompok kapitalis yang dilarang dalam Islam, maka investasi tidak hanya perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas atau jumlahnya saja. Tetapi, pengelolaan investasi harus berlandaskan konsep

amanah, yaitu tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan modal secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Nur Shadrina & Nadhilah, 2020).

Ketiga, dalam konteks Laba BUMD, ekonomi Islam menegaskan bahwa pengelolaan aset publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *maslahah*, efisiensi, dan kemaslahatan umat. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD menunjukkan bahwa tata kelola BUMD yang baik telah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah. Temuan ini sejalan dengan konsep *maslahah* dalam ekonomi Islam, yaitu setiap aktivitas ekonomi dan pengelolaan kekayaan masyarakat harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudaratan. Optimalisasi laba BUMD menunjukkan bahwa aset daerah telah dimanfaatkan secara produktif sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah. Dengan meningkatnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dan mandiri untuk membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta mendukung program kesejahteraan kolektif *(al-falah al-ijtima'i)*, yang pada akhirnya mewujudkan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara luas (Arifiansyah et al., 2022).

Melalui integrasi ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan rutinitas fiskal, melainkan juga berperan penting sebagai sarana koreksi ketimpangan, distribusi kekayaan yang berkeadilan, serta media untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif yang berkeadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, disparitas PDRB, PMDN, dan laba BUMD memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2023, dengan kontribusi model sebesar 79,82%. Secara parsial, laba BUMD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, menegaskan fungsinya sebagai instrumen strategis yang efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, variabel disparitas PDRB dan PMDN menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan wilayah dan realisasi investasi domestik belum mampu mengoptimalkan penerimaan daerah akibat belum efisiennya pengelolaan dan kurangnya perluasan basis pajak. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, hasil ini menekankan urgensi penguatan pilar kemaslahatan publik melalui integrasi prinsip keadilan *(al-'adl)* dalam menekan disparitas, akuntabilitas *(amanah)* dalam pengelolaan investasi guna melindungi aset publik *(hifz al-mal)*, serta

reorientasi laba BUMD yang tidak sekadar mengejar profitabilitas komersial melainkan berfokus pada distribusi kesejahteraan *(maslahah)* yang merata bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur disarankan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan BUMD melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel (*amanah*) agar profit yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi instrumen kesejahteraan publik *(maslahah*) yang inklusif. Di samping itu, guna mengatasi inefisiensi investasi domestik dan disparitas PDRB, kebijakan harus diarahkan pada perluasan realisasi PMDN ke sektor-sektor riil padat karya guna memperluas basis objek pajak baru *(hifz al-mal)*, serta melakukan diversifikasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder yang bernilai tambah tinggi berlandaskan pilar keadilan *(al-'adl)*. Langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat, sementara bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk memasukkan variabel makroekonomi eksternal lainnya seperti Penanaman Modal Asing (PMA) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna memperluas daya eksplanasi model analisis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penelitian ini, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini disusun oleh FA, yang bertanggung jawab atas perumusan konsep penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan naskah. AM dan SN memberikan arahan, masukan substansial, supervisi akademik, serta bimbingan untuk menyiapkan naskah hingga siap dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A., Firmansyah, F., Islam, U., & Madura, N. (2025). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Indonesia: Kajian Normatif Ibn 'Ashur. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, *6*(2), 127–136. http://dx.doi.org/10.38075/jen.v6i2.562

Ahmad Ahmad, Saemu Alwi, N. N. (2025). Hubungan Investasi Domestik dan Asing terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia: Analisis Data Panel. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *15*(1), 1200–1207. https://jep.uho.ac.id/

Aisyah, S. N., Hasanah, A. N., Fateha, A., & Kurniawan, Z. A. (2025). Strategi Peningkatan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (Pad): Studi Di Bapenda Kabupaten Jember. *Journal of*

Sharia Economics, *2*(1), 1. https://doi.org/10.65128/jse.v2i1.41

Arifiansyah, F., Kinanti, R. A., Fitriyah, D. B., Indonesia, J. T., Indonesia, J. T., & Indonesia, J. T. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *IQTISADIE: Jounal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, *2*(1)

Bakara, S., Wulandari, M., Handayani Lubis, E., Rahmansyah Nasution, A., Maulana, J., Naila Rahmi, S., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(1), 229–236. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6194

Basri, M. N. R., Astuti, S., Jamil, M., Irwandi, I., & Rajab, A. (2025). Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2005-2023. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, *6*(1), 243–250. https://doi.org/10.47065/jbe.v6i1.6751

Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504

Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *6*(1), 58–73. https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.73

Devi Astuti, & Alexandra Hukom. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(2), 73–84. https://doi.org/10.55606/optimal.v3i2.1395

Dona, E. M., Putri, A. W., Feblin, A., Destalya, G., & Nova, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD Terhadap PAD Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, *8*(2), 128–139.

Ernah, Yudha, E. P., Nafiisah, A. Z., Pasha, K. M., Hilda, Fathikha, J. K., Agustin, R., & Prasetyo, W. Y. (2025). Analisis Ketimpangan Wilayah Kawasan Bolaang Mongondow Raya Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal AGRIFO*, *10*(1), 154–163. https://doi.org/10.29103/ag.v10i1.21370

Fathiyah, F., Iskandar Nasution, Bambang Niko Pasla, Fahmi Rasid, & Muhammad Arif. (2022). Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah DalamMengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Prajaiswara*, *3*(1), 65–74. https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v3i1.43

Feriansyah, D., & Lufi Zulfikar, A. (2025). Pengaruh inflasi dan suku bunga serta jumlah uang beredar terhadap investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi Kalimantan Timur. *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan*, *16*(1), 16–23. https://doi.org/10.59651/dibus

Fitri, N., Zakaria, J., & Hasbi. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia*, *8*(1).

Gadafi, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015-2022. *Kredibel: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *2*(1), 39–51.

Gobel, Febrianti R., Prof.Dr.Muhammad Amir Arham, ME, Sri Indriyani S. Dai, SE, M. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, *5*(3), 306–325. https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i03.1266

Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). *SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Email : royhuda03*. *7*(2), 189–201. https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.102

Imansyah, H., & Sambodo, B. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Wisatawan Nusantara Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(9), 196–204. https://doi.org/10.56799/jim.v3i9.4917

Juita, F. H., Wahyudi, A., Studi, P., Terapan, S., & Perpajakan, A. (2024). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Akuntansi Prima*, *6*(1), 1–27. https://doi.org/10.34012/japri.v6i1.4875

Kay, V. P. (2022). Kesenjangan Pendapatan Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia Periode 2005-2010. *Jurnal Administrasi Terapan*, *1*(1), 73–78. https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jat.v1i1

Kelen, V. B., Sasmito, C., Cakti, I., Gunawan, U., Tribhuwana, T., & Malang, I. (2024). Analisis Strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Guna Menunjang Pembangunan Daerah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *4*(1), 105–113. https://doi.org/10.3153/humaniora.v4i1

Latifa, A., Frinaldi, A., & , Lince Magriasti, H. N. (2025). Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah Dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *7*(3), 411–417. https://doi.org/doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237

Lestari, R. I., Wardono, B., Handajani, M., Supari, S., Juniati, H., Sunarno, M. T. D., & Prayogi, E. (2025). The interplay of road infrastructure and regional finance in driving economic growth: Insights from East Kalimantan. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *11*(1), 100444. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100444

Listyowati, T. M., & Rahmayati, A. (2023). Pengaruh pajak dearah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)*, *2*(1), 68–81. https://doi.org/10.22515/juebir.v2i1.7290

Mahasarani, D., Yasin, M., Wafik, A. Z., Kunci, K., Daerah, P., Pengelolaan, H., Daerah, K., Dipisahkan, Y., & Daerah, P. A. (2024). Dampak Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di NTB. In *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 6, Issue 2). https://doi.org/10.29303/e-jep.v6i024

Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarok, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*.

Meuthia, S. A., Mintarti, S., & Defung, F. (2023). Pengaruh inflasi, PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat kesenjangan daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *20*(3), 395–405. https://doi.org/10.30872/jkin.v20i3.13924

Muhammad Alif Rafsanjani, Himawan Sutanto, I. S. (2025). Analisis Disparitas Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. *EKONOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 98–110. https://doi.org/10.29303/ekonobis.v11i1.218

Muhammad, F., Hartono, D., Hastuti, S. H., Patunru, A. A., & Balya, A. A. (2025). Should Developed Regions Bear More Responsibility in Addressing Environmental Issues? Insights from Indonesia's Unequal Regional Development. *Energy Nexus*, *17*(October 2024), 100334. https://doi.org/10.1016/j.nexus.2024.100334

Munawaroh, B., Wahyuni, A., & Pradana, A. H. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, *5*(1), 217–230. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v5i1.4570

Noviana Sri Hastuti, D. A. D. N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *24*(2), 157–170. https://doi.org/10.30596/21423

Nur Shadrina Nadhilah, T. W. (2020). Peran Pembiayaan Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota Dalam Maqashid Syariah (Koperasi Syariah Aba Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *7*(1), 173–182. https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp173-182

Nursila T Ahmat, Kanon Syarwani, Fitri Hadi Yulia Akib, F. Z. O. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (JSEP)*, *3*(1), 505–516. https://doi.org/10.37905/jsep.v3i1.33221

Paul K P, J., Suratno, E., Kadar, M., Naibaho, R., Kumara Hati, S., & Aryati, V. (2022). Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *JUMANAGE: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *1*(2), 94–102. https://doi.org/10.33998/jumanage.2022.1.2.89

Pauli Sisrawati, Arham Muhammad Amir , Akib Fitri Hadi Yulia, D. R. F. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal Dan Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pulau Sulawesi Pada Tahun 2017-2021. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (JSEP)*, *2*(1), 227–237. https://doi.org/10.37905/jsep.v2i1.26579

Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 - 2018. *Jurnal Ekonomi Diponegoro*, *10*(2), 1–10. https://doi.org/10.14710/djoe.31614

Purwanza, S. W., Aditya Wardhana, Ainul Mufidah, Yuniarti Reny Renggo, Adrianus Kabubu Hudang, Jan Setiawan, Darwin, Atik, B., Siskha, P. S., Maya, F., Rambu, L. K. R. N., Amruddin, Gazi, S., Tati, H., Sentalia, B. T., Rento, D. P., & Rasinus. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Issue March).

Putri, A. (2024). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Sarolangun. *ECONOMIE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *4*(2), 160–168. https://doi.org/10.30742/ekonomie.v6i2.3942

Salsabila, N. (2024). Minat Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Di Jawa Barat Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *2*(3), 855–864.

Sari, S. P., Balaka, M. Y., & Nur, S. (2021). Studi Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan BUMD Dalam Upaya Peningkatan PAD di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, *11*(01), 608–619.

Sinaga Defprin & Rozaini Noni. (2023). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara (2011 –2022). *Journal Of Social Science Research*, *3*(2). https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Siwi, V. N., Muntafiah, L., & Wuriati, L. C. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD di 34 Provinsi Indonesia dengan Multilevel Mixed-Effect Model. *DINAMIKA EKONOMI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(2), 329–347. https://stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/339

Syamsiyah, N., Ardana, Y., & Bayumi, M. R. (2022). Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus di Indonesia. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *10*(2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.4522

Taroreh, G., Elim, I., Tangkuman, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *5*(2), 1–4.

Trisniani, Sherafima, S. (2025). Pengaruh PMA, PMDN, PAD, dan TPT terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal of Development Economic and Digitalization (JDED)*, *4*(1), 46–64. https://doi.org/10.59664/jded.v4i1.10417

Umayyatun. (2023). Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam

Qs. Al Baqarah: 188. *Attractive : Innovative Education Journal*, *5*(3), 579–587. https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v5i3.975

Wang, L., Pal, S., Mahalik, M. K., & Gozgor, G. (2025). Empowering sustainable development in emerging economies: The role of renewable energy and domestic investment. *Energy Economics*, *148*(December 2024), 108631. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108631

Yahya, C. M., & Wildan Syafitri. (2024). Analisis Pengaruh Penyertaan Modal dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, *3*(4), 994–1008. https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.02